

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Perda No 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **6.1.1 Komunikasi**

Komunikasi dalam pelaksanaan penanganan sampah di Kecamatan Kota Soe belum dilaksanakan secara optimal. Hal dilihat dari kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang meliputi tujuan, maksud dan ketentuan di dalamnya serta dampak yang ditimbulkan oleh sampah secara integral dan diarahkan kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan (target group). Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana yaitu dari UPT Kebersihan dan Pertamanan Kota Soe selama ini telah mensosialisasikan isi Perda ini kepada Lurah untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Selama ini yang dilakukan Lurah hanya menekankan pada himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sarana penyebaran informasi juga belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Soe.

## **6.1.2 Sumber Daya**

- A. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia yang dimiliki di UPT Kebersihan dan Pertamanan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dikatakan masih rendah sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pengetahuan tentang pekerjaan administrasi yang tidak didasarkan pada pendidikan karena pendidikan tidak dijadikan sebagai syarat untuk bekerja. menjadi pegawai UPT.
- B. Sumber anggaran, total anggaran dalam penanganan sampah di Kabupaten TTS dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2021 sebesar Rp. 1.692.850.000. Sumber daya anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. ketersediaan anggaran penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten TTS yang juga mencakup penanganan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Soe.
- C. Yang menjadi keluhan baik dari petugas UPT Kebersihan dan Pertamanan maupun pengguna bak penampungan sampah terkait sarana dan prasarana pengelolaan sampah yaitu pertama pengadaan barang baru untuk menggantikan barang yang sudah rusak yang mengakibatkan kekurangan kuantitas pengangkutan sampah pada setiap masing-masing bak penampungan sampah. . Kedua, rusaknya TPS-TPS dan luas bak penampungan sampah yang tidak terlalu luas mengakibatkan sampah berceceran diluar dari bak penampungan sampah.

### **6.1.3 Komitmen**

Berdasarkan hasil observasi para pelaksana memiliki komitmen dan dukungan yang sangat besar terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dilihat dari penyelesaian tugas dan tanggung jawab tidak semata-mata karena tugas yang dijalankan, tetapi lebih terlihat sebagai bentuk dukungan mereka dalam melaksanakan tugas, meskipun tidak didukung oleh fasilitas dan keuangan yang memadai. .

### **6.1.4 Operasi Standar (SOP)**

Berdasarkan hasil observasi Standard Operating Procedure Statement (SOP) tersusun dengan baik dan akurat. Tetapi masih ada kendala terutama dalam prosedur waktu yaitu dalam SOP waktu 5 hari pengangkutan sampah dan menciptakan kebersihan di Kota Soe. Namun dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa ternyata masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh para petugas UPT Kebersihan dan Pertamanan, Petugas Pengelola Sampah kewalahan dalam melakukan pengangkutan sampah karena kurangnya petugas pengangkut sampah yang mengakibatkan tidak tercapainya jangka waktu yang ditentukan sesuai SOP.

## **6.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran penulis dalam kaitannya dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, secara khusus UPT Kebersihan dan Pertamanan Kota Soe harus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini agar apa yang menjadi maksud serta tujuan dari Perda Nomor 4 Tahun 2018 dapat tercapai.
2. UPT kebersihan dan Pertamanan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya segera mengatasi sarana/prasarana yang mengalami kerusakan dan mengajukan pengadaan barang baru ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Timor Tengah Selatan agar permasalahan sampah yang ada di Kota Soe dapat diatasi dengan baik.
3. UPT kebersihan dan Pertamanan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dari para pegawai agar lebih cepat dan tepat dalam mencapai misi yang di dukung dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar para pegawai bisa lebih baik lagi dalam menangani sampah di Kota Soe sehingga bisa mewujudkan Masyarakat Kota Soe yang bisa hidup lebih baik dan bebas dari sampah.
4. UPT kebersihan dan Pertamanan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Perlu membangun s kerja sama yang baik antara ketiga unsur yang terlibat dalam

pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2018 yakni UPT Kebersihan dan Pertamanan, Lurah dan Rt serta Rw sekota Soe. Hal ini agar apa yang menjadi tujuan dari Perda ini dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelita Rianty. (2016). *Implementasi Kebijakan Kawasan Zona Pendidikan (Studi Kasus Kebijakan Kawasan Pendidikan di Jalan ZA. Pagar Alam, Gedung Meneng dan Rajabasa Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. PT Bumi Aksara. Awan
- Abdoellah, & Yuni Rusfina. (2016). *Teori dan Analisa Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dr. H. Tachjan, M. S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. [https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2011/02/implementasi\\_kebijakan\\_publik\\_t.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf).
- Drs. Suparno. (2002). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REMBANG*. Dwiputra Pustaka Jaya Star Safira-Nizar Mansion E4 No.14 Sidoarjo.
- Halilurrahman. (2020). Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram. In <https://repository.ummat.ac.id/> (Vol. 21, Nomor 1). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hs, A. (2020). *Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Minasa Maupa Di Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Indra, Y. (2007). *Kajian Pengelolaan Sampah Di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Juliprijanto, S. N. S. dan W. (2017). *Manfaat Bank Sampah Bagi Masyarakat Di Dusun Semali Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*. Universitas Tidar Magelang.
- Krismansyah, F. (2017). *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Krimitati Tasrin, & Partiw. (2018). Model Inovasi Akselerasi Minat Baca yang

Berkelanjutan Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(1), 95–116.  
<https://doi.org/10.31845/jwk.v21i1.70>

Mario O.R.N Rangga. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kebersihan Kota Kupang). In <http://repository.unwira.ac.id/> (Vol. 561, Nomor 3). Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Misroji. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok*. Universitas EsaUnggul Jakarta.

Nelis Mardhiah dan Yuliswati. (2015). *Penerapan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Gampong*. 2, 98–111.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah*.

Richard Djiko. (2018). *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara*. 3(2), 104.

Semy Ndolu. (2019). *Tata Kelola Sampah Pantai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang Studi Pada Kampung Nelayan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Sukmadinata, N. S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Jakarta Pusat.

Yosep Raga. (2019). *Analisis Penanganan Masalah Sampah Oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang* (Vol. 561, Nomor 3). Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.